



Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Faktor Keuangan Terhadap Kondisi *Financial Distress* Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Khoirriyah Anissa Hardiyanti^{1*}, Zulkifli², Selvita Meilansari³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya

* E-mail Korespondensi: khoirriyahannisaa@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 21-11-2025

Revision: 15-12-2025

Published: 25-12-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1200

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor keuangan terhadap kondisi financial distress pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019–2023. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, *budgetary solvency ratio*, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Sementara variabel dependen yang digunakan adalah kondisi *financial distress*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel menggunakan *software EViews 13*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel derajat desentralisasi dan *budgetary solvency ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Namun, variabel kemandirian keuangan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi indikator awal financial distress serta dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan, *Budgetary Solvency Ratio*, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, *Financial Distress*.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the influence of regional government characteristics and financial factors on the condition of financial distress in regencies/cities in South Sumatra Province during the 2019–2023 period. The independent variables used in this study are the degree of decentralization, financial independence, budgetary solvency ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio. The dependent variable is financial distress. This research employs a

Acknowledgment

2203

quantitative approach using panel data regression with the help of EViews 13 software. The data used are secondary data obtained from audited local government financial statements issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The results show that, partially, the variables of degree of decentralization and budgetary solvency ratio have a significant effect on financial distress. However, financial independence, effectiveness ratio, and efficiency ratio do not have a significant effect. Simultaneously, all independent variables significantly influence financial distress. This study is expected to serve as a reference for local governments in identifying early indicators of financial distress and in improving the quality of financial management in an effective and efficient manner.

Key word: *Degree of Decentralization, Financial Independence, Budgetary Solvency Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Financial Distress*

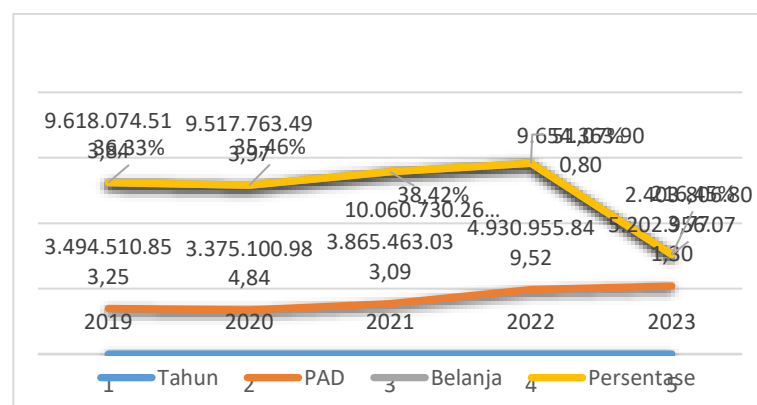
© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil riset Ombudsman (2017) menunjukkan fakta bahwa sebagian besar pelayanan publik di Indonesia masih memiliki rapor merah. Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat yang diakibatkan oleh tidak cukupnya dana pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur publik karena kurangnya alokasi belanja modal merupakan kondisi *financial distress* (Jones & Walker, 2007). Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, maka arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2017 adalah dengan meningkatkan kualitas belanja kabupaten/kota dengan sasaran rata-rata belanja modal sebesar 30% dari total belanja. Minimnya jumlah belanja modal yang dikeluarkan karena belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, dapat menjadi salah faktor yang menyebabkan pemerintah mengalami kondisi *financial distress* (Sutaryo, 2019). Laporan keuangan merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan dapat memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah. Sehingga informasi dalam laporan keuangan dianggap relevan untuk pengambilan keputusan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah (Sutaryo, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 280 tentang Pemerintahan Daerah, Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point ke 3, mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Karakteristik pemerintah daerah, seperti kepemimpinan yang efektif, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menghindari kesulitan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga menekankan pentingnya perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Faktor keuangan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan utang, juga berperan penting dalam menentukan kesehatan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber pendapatan dan mengelola belanja dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Berbagai faktor, seperti batasan perekonomian, perubahan kebijakan, dan dampak pandemi COVID-19, telah mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah. Selama periode 2019 hingga 2023, PAD Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan, dari Rp4,93 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp5,20 triliun pada tahun 2023. Namun, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah tetap rendah, sekitar 19,79% pada tahun 2022, yang dapat menyebabkan kondisi *financial distress*.



Gambar 1. Total PAD dan Belanja Daerah

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2025)

Selama empat tahun pertama, PAD selalu berada jauh di bawah belanja daerah, dengan persentase kontribusi PAD terhadap belanja yang berkisar antara 35% hingga 51%, mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa daerah tidak memiliki kemandirian fiskal dan risiko terhadap tekanan anggaran.

Karakteristik pemerintah daerah sangat mempengaruhi tingkat kesulitan keuangan, terutama dalam konteks derajat desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah dibandingkan belanja menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum disertai dengan peningkatan kapasitas pendapatan lokal. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat tetap tinggi, sehingga otonomi keuangan belum sepenuhnya terwujud. Karakteristik ini mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daerah, yang menjadi akar dari kesulitan keuangan atau *financial distress*.

Faktor keuangan yang mempengaruhi *Budgetary Solvency Ratio* menjadi indikator penting dalam memahami kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Perlunya reformasi kebijakan fiskal daerah yang menekankan pada peningkatan efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan daerah, dan perencanaan anggaran yang realistis dan berkelanjutan. Menurut Lailiyah & Desitama, (2024), menemukan bahwa tingginya nilai dari rasio ini menunjukkan pendapatan pemerintah daerah mampu mendanai belanja daerahnya secara efektif, termasuk belanja yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi kelompok masyarakat, sehingga rendah kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmi & Sari (2023) derajat desentralisasi dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Rahima Zakia (2021) menunjukkan bahwa rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Menurut riset Rahmi & Ariani (2020) derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan menurut penelitian Elfiyana & Arza (2022), kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmadila (2024) menunjukkan bahwa Secara simultan terdapat pengaruh signifikan pengaruh derajat desentralisasi, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan pada pemerintahan provinsi di Sumatera selama periode 2018-2022. Namun secara parsial derajat desentralisasi mempunyai pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Murtanto (2024) menunjukkan kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Dan riset yang dilakukan oleh Hus-

niati, Santoso, & Pratama (2016) menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan, solvabilitas, kinerja keuangan, efisiensi dan pemekaran daerah tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Agency Theory atau yang dikenal dengan Teori Keagenan yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen & William H. Meckling, yang menggambarkan hubungan kontraktual antara beberapa pihak, yang dikenal sebagai pihak principal atau pemberi mandat, dan agent, yaitu pihak yang diberi mandat oleh principal dan memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan. Dalam teori keagenan, konsepnya melibatkan perjanjian antara principal dan agent, di mana konsep principal-agent dalam konteks pemerintah daerah diasumsikan bahwa kendali atas perilaku terbatas oleh keterlibatan masyarakat dalam memantau hasil kebijakan pemerintah daerah. Menurut teori keagenan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur PAD, karena sumber anggaran berasal dari masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kondisi *Financial Distress*. Berlandaskan data terkini, penelitian yang diteliti akan melakukan evaluasi terhadap konsistensi hasil yang diperoleh serta mengidentifikasi suatu perbedaan yang ada pada penelitian sebelumnya. Perbedaan utamanya terletak pada pilihan objek penelitian yang difokuskan, yaitu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan periode tahun anggaran terbaru yaitu dari 2019 sampai 2023, serta variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan dari segi faktor eksternal dan internal pemerintah daerah dengan menggunakan variabel independen meliputi Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan, *Budgetary Sovency Ratio*, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi. Sedangkan Variabel Dependen adalah *Financial Distress*.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengayaan perpustakaan mahasiswa Jurusan Akuntansi di bidang Akuntansi Sektor Publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menghindari *Financial Distress*.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data pada riset ialah dari sumber data sekunder yang didapatkan pada laman e-PPID <http://www/bpk.go.id> berupa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *software Ecconometric Views (Eviews)* versi 13, dengan pengujian sebagai bahwasannya, Analisis Statistik Deskriptif, ialah deskripsi data disediakan oleh statistik deskriptif memakai serangkaian ukuran numerik, seperti rata-rata, deviasi standar, varians, maksimum, minimum, total, rentang, kurtosis, serta skewness (kemiringan distribusi) (Ghozali, 2018). Pemilihan Model Regresi Data Panel, *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) adalah tiga kategori model regresi data panel. Tiga uji berbeda dipakai demi mengidentifikasi model tepat : uji *multiplekser Lagrange*, uji *Hausman*, dan uji *Chow* (Widarjono dalam (Iqbal, 2015). Pengujian Asumsi Klasik, meliputi pengujian autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Analisis Regresi Data Panel, Unit penampang yang sama akan diamati atau diukur pada berbagai periode dalam studi regresi berganda data panel, yang menggabungkan data penampang dan data deret waktu (Sugiyono, 2019).

Hipotesis :

H¹: Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*.

H²: Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*.

H³: *Budgetary Solvency Ratio* berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*.

H⁴: Rasio Efektifitas berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*.

H⁵: Rasio Efisiensi berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*.

Pengujian Hipotesis, Nilai probabilitas dan nilai statistik-t menunjukkan pengujian hipotesis. Dengan menggunakan statistik statistik untuk pengujian hipotesis, nilai statistik-t adalah 1,66437 dan alpha-nya 5%. Oleh karena itu, ketika nilai probabilitas kurang 0,05 dan statistik-t melebihi dari 1,67866, hipotesis ditolak dan Ha diterima.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif atas data Derajat Desentralisai, Kemandirian Keuangan, *Budgetary Sovency Ratio*, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi terhadap *Financial Distress* adalah:

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0.44	-1.53	0.03	0.32	0.29	0.67
Median	0.43	-1.54	0.01	0.31	0.29	0.69
Maximum	0.76	-1.27	0.57	0.76	0.35	0.75
Minimum	0.26	-1.59	-0.13	0.27	0.24	0.19
Std. Dev.	0.07	0.06	0.10	0.05	0.02	0.07
Observations	85	85	85	85	85	85

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Berdasarkan tabel 1, hasil statistik deskriptif dapat diperoleh nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi sebagai berikut. Variabel *Financial Distress* (Y) menunjukkan nilai rata-rata sekitar 0,44, dengan nilai tengah atau median yang sangat dekat, yaitu 0,43. Kedekatan antara rata-rata dan median ini mengindikasikan bahwa distribusi data untuk variabel Y cenderung simetris. Nilai Y berkisar dari minimum 0,26 hingga maksimum 0,76. Dengan standar deviasi sebesar 0,07, dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel Y relatif kecil; sebagian besar nilai Y cenderung terkonsentrasi di sekitar rata-ratanya, menunjukkan konsistensi yang cukup tinggi dalam observasi variabel ini. Variabel Derajat Desentralisasi (X1) memiliki nilai rata-rata sekitar -1.53, yang juga sangat dekat dengan nilai mediannya yaitu -1.54. Konsistensi antara mean dan median pada X1 semakin memperkuat indikasi distribusi data yang sangat simetris. Nilai X1 terentang dari -1,59 sebagai nilai terendah hingga -1,27 sebagai nilai tertinggi. Standar deviasi X1 adalah 0,06, menunjukkan tingkat penyebaran data yang moderat di sekitar nilai rata-ratanya. Variabel Kemandirian Keuangan (X2) memiliki rata-rata sekitar 0,03 dan median 0,01. Ada sedikit perbedaan antara mean dan median, yang mungkin mengindikasikan sedikit ketidaksimetrisan atau kemiringan dalam distribusi data X2. Nilai minimum yang tercatat untuk X2 adalah -0,13, sementara nilai maksimumnya mencapai 0,57.

Rentang data yang cukup lebar ini, ditambah dengan standar deviasi sebesar 0,10, menunjukkan variabilitas yang lumayan dalam observasi variabel X2. Variabel *Budgeting Solvency Ratio* (X3) arena menunjukkan nilai-nilai negatif. Rata-rata variabel ini berada di angka 0,32, dengan median yang sangat dekat yaitu 0,31. Kedekatan antara mean dan median tetap menyiratkan distribusi data yang cenderung simetris. Nilai terendah X3 adalah 0,27 dan nilai tertingginya adalah 0,76. Standar deviasi X3 sebesar 0,05 menggambarkan tingkat penyebaran data yang moderat di sekitar nilai rata-ratanya yang negatif. Variabel Rasio Efektifitas (X4) memiliki rata-rata sekitar 0,29 dan median 0,29. Sama seperti Y dan X1, kedekatan antara mean

dan median menandakan distribusi data yang cukup simetris. Variabel X4 memiliki rentang nilai dari 0,24 hingga 0,35. standar deviasi X4 adalah 0,02. Hal ini mengindikasikan bahwa data untuk variabel X4 memiliki tingkat penyebaran atau variabilitas yang paling luas dibandingkan dengan variabel Y, X1, X2, X3, dan X5. Variabel Rasio Efisiensi (X5) memiliki rata-rata sekitar 0,67 dan median 0,69, yang menunjukkan distribusi data yang sangat simetris. Namun, rentang nilai X5 cukup besar, dari 0,19 sebagai minimum hingga 0,75 sebagai maksimum. Selain itu, variabel X5 mencatat standar deviasi, yaitu 0,07 Angka ini menunjukkan bahwa nilai-nilai observasi untuk X5 sangat terkonsentrasi di sekitar rata-ratanya, mengindikasikan variabilitas yang sangat rendah dan data yang sangat homogen.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Pengujian Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	1.263120	(16,63)	0.2489
Cross-section Chi-square	23.649715	16	0.0974

Sumber: Output data diolah (Eviews 13), 2025.

Hasil dari uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section Chi-square* sebesar $0,0974 > 0,05$, artinya H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Pengujian Hausman

Correlated Random Effect – Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. D.f.	Prob.
Cross-section random	5.125804	5	0.4007

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Hasil dari uji *hausman* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section random* sebesar $0,4007 > 0,05$, artinya H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM)

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Hasil Pengujian Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Test for Random Effects			
Null hypotheses: No effect			
Alternative hypotheses: Two-sided (breusch-Pagan) and one-side (all others) alternatives.			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.009785 (0.9212)	0.426362 (0.5138)	0.43614 (0.5090)
Honda	0.098921 (0.4606)	0.652964 (0.2569)	0.53166 (0.2975)
King-Wu	0.098921 (0.4606)	0.652964 (0.2569)	0.62826 (0.2649)
Standardized Honda	0.391096 (0.3479)	1.145799 (0.1259)	-2.84956 (0.9978)
Standardized King-Wu	0.39109 (0.3479)	1.145799 (0.1259)	- (0.9849)
Gourieroux, et al.	--	--	0.436148 (0.4555)

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

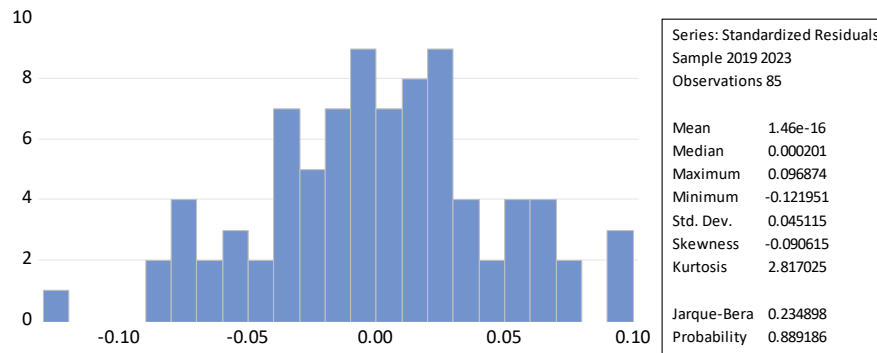
Hasil dari uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan bahwa nilai signifikan dari *cross section both* sebesar $0,9212 > 0,05$, artinya H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

Penggunaan *Common Effect Model* (CEM) telah terpilih pada dua pengujian yaitu *Chow* dan *Lagrange Multiplier*. Sedangkan uji *Random Effect Model* (REM) hanya terpilih pada uji Hausman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model regresi data panel, penggunaan model yang terbaik adalah *Common Effect Model* (CEM).

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menilai kenormalan data; bila *probability* melebihi 0,05, bentuk residual dianggap tipikal (Black & Kan, 2019).



Gambar 2. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Sumber: Output data diolah dengan *Eviews 13* (2025)

Berlandaskan uji normalitas dalam riset, nilai probability senilai 0,8892, artinya residual model berdistribusi normal dan penyebaran residual yang berbentuk menyerupai lonceng atau *bell-shaped curve* meskipun sedikit condong ke kiri (Black & Kan, 2019).

Uji Multikolinearitas

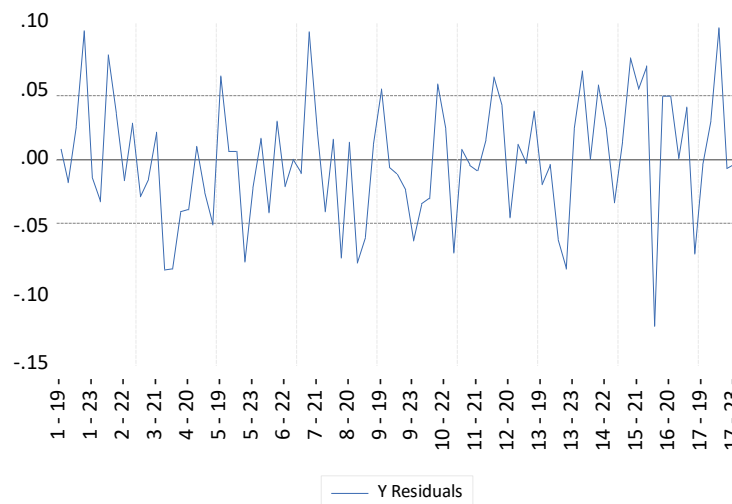
Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1,000000	-0.027910	0.049233	0.071827	0.024382
X2	-0.027910	1.000000	0.818574	0.091188	-0.957494
X3	0.049233	0.818574	1.000000	0.042027	-0.923659
X4	0.071827	0.091188	0.042027	1.000000	-0.100172
X5	0.024382	-0.957494	-0.923659	-0.100172	1.000000

Sumber: output data diolah dengan *Eviews 13* (2025)

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian mutikolinearitas diperoleh bahwa Koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar $-0,0279 < 0,90$. Koefisien korelasi X1 dan X3 sebesar $0,0493 < 0,90$. Koefisien korelasi X1 dan X4 sebesar $0,0718 < 0,90$. Koefisien korelasi X1 dan X5 sebesar $0,0243 < 0,90$. Koefisien korelasi X2 dan X3 sebesar $0,8186 < 0,90$. Koefisien korelasi X2 dan X4 sebesar $-0,9119 < 0,90$. Koefisien korelasi X2 dan X5 sebesar $-0,9575 < 0,90$. Koefisien korelasi X3 dan X4 sebesar $0,0420 < 0,90$. Koefisien korelasi X3 dan X5 sebesar $-0,9236 < 0,90$. Koefisien korelasi X4 dan X5 sebesar $-0,1001 < 0,90$. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi semua variabel terbebas multikolinearitas atau lolos pengujian multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.

Sumber: Output data diolah dengan *Eviews 13* (2025)

Pengujian heteroskedastisitas riset menampilkan jika residu tidak melebihi batas 500 juga -500, menunjukkan jika varians residu selaras. Membuat uji heteroskedastisitas dinyatakan lulus atau tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan penentuan model regresi data panel, *Common Effect Model* (CEM). CEM menganggap bahwa semua entitas (misalnya perusahaan, negara, individu) dalam data panel bersifat identik baik dalam karakteristik maupun pengaruhnya terhadap variabel dependen (Gujarati, 2021).

Tabel 6. Hasil Regresi Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/07/25 Time: 16:33				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 50				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.088425	0.507238	-2.145786	0.0349
X1	-0.149690	0.094589	-1.582524	0.1175
X2	0.864253	0.221333	3.9047523	0.0001
X3	1.176149	0.317017	3.710045	0.0003
X4	-0.092129	0.288393	-0.319459	0.7502
X5	1.380447	0.499124	2.765738	0.0070
R-squared	0.582780	Mean dependent var	0.438132	

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 07/07/25 Time: 16:33
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Adjusted R-squared	0.556374	S.D. dependent var		0.069846
S.E. of regression	0.046521	Akaike info criterion		3.229846
Sum squared resid	0.170973	Schwarz criterion		3.057423
Log likelihood	143.268455	Hannan-Quinn criter.		3.160493
F-statistic	22.069798	Durbin-Watson stat		1.796641
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Berdasarkan hasil regresi *Common Effect Model*, model estimasi yang diperoleh dari *Common Effect Model* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = 1.0884 - 0.1497 \cdot X_1 + 0.8643 \cdot X_2 + 1.17615 \cdot X_3 - 0.0921 \cdot X_4 + 1.3804 \cdot X_5 + \varepsilon$$

Hasil persamaan dengan regresi linier data panel diatas menunjukkan bahwa *Financial Distress* memiliki nilai konstanta sebesar 1,0884 dengan probabilitas sebesar 0,0349, artinya bahwa tanpa adanya nilai variabel bebas, maka diketahui bahwa akan mengalami penurunan variabel terikat *Financial Distress* sebesar 3,5%%.

Nilai Koefisien Derajat Desentralisasi (X_1) sebesar -0,149690 yang bernilai negatif. Artinya bahwa setiap peningkatan variabel derajat desentralisasi sebesar 1% maka akan menyebabkan variabel terikat (dependen) *Financial Distress* mengalami penurunan sebesar 14,97% dengan asumsi variabel lain nilainya tetap.

Nilai Koefisien Kemandirian Keuangan (X_2) sebesar 0,864253 yang bernilai positif. Artinya bahwa setiap peningkatan variabel Kemandirian Keuangan sebesar 1% maka akan menyebabkan variabel terikat (dependen) *Financial Distress* mengalami peningkatan sebesar 86,43% dengan asumsi variabel lain nilainya tetap.

Nilai Koefisien *Budgeting Solvency Ratio* (X_3) sebesar 1,176149 yang bernilai positif. Artinya bahwa setiap penurunan variabel *Budgeting Solvency Ratio* sebesar 1% maka akan

menyebabkan variabel terikat (dependen) *Financial Distress* mengalami peningkatan sebesar 117,61% dengan asumsi variabel lain nilainya tetap.

Nilai Koefisien Rasio Efektifitas (X4) sebesar -0,092129 yang bernilai negatif. Artinya bahwa setiap peningkatan variabel Rasio Efektifitas sebesar 1% maka akan menyebabkan variabel terikat (dependen) *Financial Distress* mengalami penurunan sebesar 9,21% dengan asumsi variabel lain nilainya tetap.

Nilai Koefisien Rasio Efisiensi (X5) sebesar 1,380447 yang bernilai negatif. Artinya bahwa setiap peningkatan variabel Rasio Efisiensi sebesar 1% maka akan menyebabkan variabel terikat (dependen) *Financial Distress* mengalami penurunan sebesar 138,05% dengan asumsi variabel lain nilainya tetap.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.582780
Adjusted R-squared	0.556374

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Nilai Adjusted *R-squared* menunjukkan angka 0.556374 atau 55,63% sedangkan sisanya disebabkan karena faktor lain dimana tidak terdapat dalam riset ini. Artinya *Financial Distress* dipengaruhi oleh variabel independen Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan, *Budgeting Solvency Ratio*, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi sebesar 55,64%.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji F

F-statistic	22.069798
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Dapat diketahui bahwa nilai F-statistic sebesar $22.069798 > 2,29$ dan hasil *probability* sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini memiliki arti bahwa pada tingkat $\alpha = 0,05$ H_1 diterima artinya variabel independen Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan, *Budgeting Solvency*

Ratio, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Financial Distress.

Uji T

Nilai statistik-t serta nilai *probability* dalam studi ini menunjukkan uji-t. Jika nilai statistik-t melebihi tabel-t juga nilai *probability* dibawah 0,05, bisa diartikan jika variabel bebas memengaruhi variabel terikat atau dugaan diterima.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji T

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.088425	0.507238	-2.145786	0.0349
X1	-0.149690	0.094589	-1.582524	0.1175
X2	0.864253	0.221333	3.9047523	0.0001
X3	1.176149	0.317017	3.710045	0.0003
X4	-0.092129	0.288393	-0.319459	0.7502
X5	1.380447	0.499124	2.765738	0.0070

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Berdasarkan pada pengujian diatas, didapatkan hasil bahwa X1 memiliki t-hitung sebesar $1,582524 < 1,66437$ dan nilai probabilitas sebesar $0,1175 > 0,05$, maka H1 ditolak dan H0 diterima artinya bahwa Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Hasil bahwa X2 memiliki t-hitung sebesar $3,904752 > 1,66437$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0001 < 0,05$, maka H2 diterima artinya bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Didapatkan hasil bahwa X3 memiliki t-hitung sebesar $3,710045 > 1,66437$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0003 < 0,05$, maka H3 diterima artinya bahwa *Budgeting Solvency Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Didapatkan hasil bahwa X4 memiliki t-hitung sebesar $0,319459 < 1,66437$ dan nilai probabilitas sebesar $0,7502 > 0,05$, maka H4 ditolak dan H⁰ diterima artinya bahwa Rasio Efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Berdasarkan pada pengujian diatas, didapatkan hasil bahwa X5 memiliki t-hitung sebesar $2,765738 > 1,66437$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0070 < 0,05$, maka H5 diterima artinya bahwa *Budgeting Solvency Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*.

Pembahasan

Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap Kondisi *Financial Distress* Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel derajat desentralisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* di setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga hipotesis 1 (H1) ditolak dan hipotesis 0 (H0) diterima.

Teori *Fiscal Decentralization and Fiscal Discipline* yang digunakan oleh Thornton, membahas bagaimana hubungan tingkat desentralisasi fiskal dengan kedisiplinan fiskal atau kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan anggaran agar terhindar dari *financial distress*. *Financial distress* merujuk pada kondisi keuangan yang memburuk, ditandai oleh tidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban fiskalnya, seperti membayar utang atau menutup defisit anggaran. derajat desentralisasi tidak selalu memiliki hubungan langsung dan signifikan terhadap terjadinya *financial distress*. Dalam pendekatan netralitas, desentralisasi fiskal justru dipandang sebagai alat, bukan sebagai penyebab. Artinya, keberadaan desentralisasi fiskal tidak secara otomatis menyebabkan terjadinya krisis keuangan, tetapi sangat bergantung pada bagaimana mekanisme dan kelembagaan fiskal dijalankan di masing-masing daerah.

Penelitian ini sejalan dengan temuan yang disampaikan oleh Fatmawati, dkk, (2024) yang menunjukkan bahwa Dari seluruh variabel yang diuji, hanya kompleksitas pemerintah daerah yang berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Derajat desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan, baik secara positif maupun negatif. Peningkatan atau penurunan otonomi fiskal daerah (dalam bentuk rasio desentralisasi) tidak secara langsung memengaruhi probabilitas terjadinya kesulitan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian Yoprastiw, (2017) memberikan bukti empiris bahwa derajat desentralisasi tidak memiliki hubungan signifikan dengan kondisi *financial distress* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini menyebutkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan tata kelola keuangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Kondisi *Financial Distress* Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel kemandirian keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *financial distress* sebesar 16,18%, maka dapat diketahui bahwa hipotesis 2 (H2) diterima. Artinya semakin banyak besar rasio kemandirian keuangan akan turut menyebabkan peningkatan terhadap kondisi *financial distress* di setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Teori fiskal federalisme dan desentralisasi fiskal

menyatakan bahwa daerah dianggap sebagai entitas yang memiliki pengetahuan paling baik atas kebutuhan warganya, sehingga pemberian kewenangan fiskal akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas publik, dan peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah daerah yang terlalu bergantung pada transfer pusat rentan mengalami tekanan anggaran, bahkan *financial distress*. Sebaliknya, semakin tinggi kemandirian fiskal, semakin besar kemampuan daerah untuk mendanai belanja rutin, investasi, dan respons terhadap kebutuhan lokal, sehingga menurunkan risiko distress.

Penelitian ini sejalan dengan temuan yang disampaikan oleh Mahayani & Gayatri, (2017) yang berjudul “Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, *Level Of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress* Pada Saat Pandemi Covid-19 Melalui Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019-2020” menunjukkan bahwa secara parsial, kemandirian fiskal signifikan memengaruhi kondisi *financial distress*. Penelitian Lailiyah & Desitama, (2024) menyajikan bukti empiris kuat bahwa kemandirian finansial daerah sangat penting sebagai faktor penentu kondisi finansial stabil. Daerah yang lebih mampu secara fiskal cenderung lebih tahan terhadap tekanan keuangan.

Pengaruh *Budgetary Solvency Ratio* Terhadap Kondisi *Financial Distress* Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *financial distress* sebesar 14,84%, maka dapat diketahui bahwa hipotesis 2 (H2) diterima. Artinya semakin banyak besar rasio kemandirian keuangan akan turut menyebabkan peningkatan terhadap kondisi *financial distress* di setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam teori manajemen fiskal, solvabilitas anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa struktur pendapatan dan belanja daerah dalam keadaan sehat. Artinya, belanja tidak melebihi pendapatan, dan daerah tidak tergantung pada pinjaman atau dana talangan untuk membiayai pengeluarannya. Dengan kondisi tersebut, daerah berada dalam posisi yang relatif aman secara fiskal, dan kecil kemungkinan mengalami tekanan keuangan atau *financial distress*. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan defisit struktural, peningkatan utang, dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal. Inilah yang menjadi sumber *financial distress* dalam konteks keuangan daerah.

Dukungan empiris atas hasil ini juga terlihat dalam studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Firmansyah & Sutrisno, (2019) yang berjudul “Analisis Pengaruh Solvabilitas Anggaran Terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah di Indonesia” yang menyebutkan bahwa rasio solvabilitas anggaran yang sehat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tingkat kerentanan fiskal dan mencegah terjadinya *financial distress*. Li dkk, (2021) hubungan antara solvabilitas fiskal dan akuntabilitas keuangan memberi dasar teoretis dan empiris yang kuat bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh signifikan terhadap TLRHP. Pemerintah daerah yang sehat secara fiskal lebih mampu, lebih siap, dan lebih terdorong untuk menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga audit seperti BPK.

Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Kondisi *Financial Distress* Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* di setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Artinya hipotesis 4 (H4) ditolak dan hipotesis 0 (H0) diterima.

Teori *Contingency* menyatakan bahwa tidak ada satu ukuran performa yang berlaku universal untuk semua organisasi atau dalam semua situasi. Efektivitas dan efisiensi hasil keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti struktur organisasi, ukuran pemerintah, sumber daya, dan kapasitas kelembagaan. Rasio efektivitas (seperti PAD dibandingkan target atau realisasi belanja publik) tidak dapat dianggap sebagai penentu langsung dari *financial distress*. Efeknya tergantung pada kondisi lingkungan, seperti tekanan fiskal, dukungan transfer dari pusat, peraturan internal, kapasitas fiskal, dan sebagainya. Rasio efektivitas mengukur output atau target, tetapi *financial distress* adalah outcome yang mencerminkan kondisi ketahanan fiskal menyeluruh.

Temuan ini didukung oleh penelitian Sari & Murtanto, (2024) menyebutkan bahwa Rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sebaliknya, rasio lain seperti pertumbuhan pendapatan (*revenue growth*), kemandirian fiskal, dan desentralisasi menunjukkan hubungan signifikan. Efektivitas anggaran (output PAD) bukan faktor penentu kondisi Keuangan daerah secara keseluruhan. Hal ini mendukung argumen teoritis bahwa efektivitas hanyalah satu dimensi, sementara distress dipengaruhi oleh kombinasi rasio dan kapasitas fiskal lainnya. Jausyan, (2022) menunjukkan bahwa Tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI Tahun 2018 dan 2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan

keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan 2020. Hal ini mendukung bahwa rasio efektivitas TLRHP tidak selalu berpengaruh signifikan, tergantung konteks daerah, periode, dan lain yang terlibat.

Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Kondisi *Financial Distress* Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Efisiensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel financial distress sebesar 8,83%, maka dapat diketahui bahwa hipotesis 5 (H5) diterima. Artinya semakin banyak besar Rasio Efisiensi akan turut menyebabkan peningkatan terhadap kondisi *financial distres* di setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Teori tekanan fiskal atau *fiscal stress theory* oleh Beth W. Honadle, James M. Costa, dan Beverly A. Cigler mengkaji kondisi di mana pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan karena ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. rasio efisiensi fiskal menjadi indikator penting untuk mendeteksi atau bahkan mencegah terjadinya *financial distress*. Jika pemerintah daerah tidak efisien dalam membelanjakan anggaran, maka ketika pendapatan menurun atau terjadi guncangan ekonomi, daerah tersebut lebih mudah mengalami tekanan fiskal atau bahkan masuk ke dalam kondisi *financial distress*.

Penelitian ini juga relevan dengan temuan Eptyaningtyas & Poerwati, (2022) dalam studinya yang berjudul “Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap *Financial Distress*”. Studi tersebut menunjukkan bahwa rasio efisiensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Artinya, semakin tinggi tingkat efisiensi pengeluaran terhadap penerimaan, justru semakin besar kemungkinan daerah mengalami tekanan fiskal atau *financial distress*. Secara teoritis, efisiensi seharusnya menjadi indikator pengelolaan keuangan yang baik. Namun dalam praktiknya, efisiensi yang dicapai tidak selalu mencerminkan kondisi fiskal yang sehat. Eptyaningtyas & Poerwati, (2022) menduga bahwa tingginya rasio efisiensi tersebut bukanlah hasil dari peningkatan kinerja fiskal, melainkan karena terjadi penurunan belanja secara umum atau adanya kontraksi belanja, terutama pada pos-pos pengeluaran yang penting dan strategis. Dengan kata lain, efisiensi ini terjadi karena daerah menekan pengeluaran secara drastis akibat keterbatasan fiskal, bukan karena adanya peningkatan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Desvita, (2023) menyebutkan bahwa Rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap opini

audit laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi TLRHP tidak memoderasi hubungan antara rasio efisiensi dan opini audit.

Pengaruh Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan, *Budgetary Solvency Ratio*, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Terhadap Kondisi *Financial Distress* Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

Berlandaskan hasil uji F (uji simultan) variabel Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan, *Budgetary Solvency Ratio*, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Koefisien determinasi sebesar 56,64%, artinya sebesar 56,64% variabel *financial distress* dipengaruhi oleh Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan, *Budgetary Solvency Ratio*, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil ini relevan dengan temuan Putri & Haryanto, (2020) menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress*, meskipun arah pengaruhnya secara statistik negatif. Lebih lanjut, Rahayu dkk., (2023) menemukan bahwa *budgetary solvency ratio* dan tingkat desentralisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*. Senada dengan itu, Yuliani, (2018) menyoroti bahwa rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, tetapi dengan catatan bahwa pengaruhnya dapat bersifat positif. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menguatkan argumen bahwa interpretasi indikator fiskal seperti kemandirian, solvabilitas, dan efisiensi harus dilakukan secara hati-hati dan kontekstual. Nilai rasio yang terlihat baik secara statistik tidak menjamin manajemen keuangan daerah berjalan dengan sehat.

SIMPULAN

Hasil penelitian dari data yang telah diuji membuktikan bahwa Derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat otonomi fiskal belum mampu secara langsung memengaruhi stabilitas keuangan daerah. Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*, Artinya, semakin tinggi kemandirian fiskal, justru berpotensi meningkatkan risiko *distress* jika tidak dibarengi dengan belanja yang efisien dan tepat sasaran. *Budgetary solvency ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Ini mengindikasikan bahwa solvabilitas yang terlihat baik secara rasio tidak menjamin bebas dari tekanan fiskal, terutama jika dicapai

melalui strategi fiskal yang tidak sehat. Rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Artinya, efisiensi pengeluaran yang dicapai mungkin berasal dari pemangkasan belanja penting, bukan dari peningkatan efektivitas. Sementara itu, hasil uji F menunjukkan jika kelima variabel secara simultan berdampak signifikan terhadap *financial distress*.

Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu meningkatkan derajat desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Pengelola keuangan daerah perlu lebih fokus pada pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kinerja dengan memperhatikan *budgetary solvency ratio*, terutama dalam menyeimbangkan pendapatan dan belanja. Keterbatasan penelitian yaitu pada lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan pada penelitian selanjutnya memperluas ruang lingkup dan periode waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. A. (2022). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Artha, S., Dewata, E., & Nurhasanah, S. (2024). Determinants Of Factors Influenced The Follow-up Of BPK RI Audit. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 2020-2046.
- Black, K., & Kan, M. (2019). *Business statistics: For contemporary decision making (9th ed.)*. Hoboken: Wiley.
- Deswira, A. (2024). Analysis of Regional Financial Management Performance and Level of Regional Independence: Case Study of The Regional Financial Agency of Tanah Datar Regency. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 74-90.
- Elfiyana, R., & Arza, F. (2022). Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap financial distress pada pemerintah kabupaten di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 75-89. doi:<https://doi.org/10.5678/jakd.v9i1.2022>
- Eptyaningtyas, & Poerwati. (2022). Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(3), 984-990.
- Fatmawati, Andriana, & Wardhaningrum. (2024). Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Financial Distress di Provinsi Jawa Timur. *ACE: Accounting Research Journal*, 3(1), 62-76. doi:<https://doi.org/10.1234/ace.v3i1.2024.062>

- Firmansyah, & Sutrisno. (2019). *Analisis Pengaruh Solvabilitas Anggaran terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga.
- Ghanniya, Y. H. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2021). *Dasar-dasar ekonometrika (edisi terbaru, versi terjemahan)*. Salemba Empat.
- Harlin, A., Nadirsyah, & Meutia, R. (2023). Factors Affecting the Level of Implementation of Follow-Up Recommendations from the Audit Board in Local Governments in Aceh Province. *International Journal Of Social Health*, 2(9), 586-594.
- Husniati, S., Santoso, B., & Pratama, A. (2016). Pengaruh kemandirian keuangan, solvabilitas, kinerja keuangan, efisiensi, dan pemekaran daerah terhadap financial distress pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Publik*, 4(2), 98-112. doi:<https://doi.org/10.7654/jmap.v4i2.2016>
- Imtinan , A., & Hasibuan, F. (2021). *Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada kementerian Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan Bogor Disclosure Level of Financial Statement*. Bogor: Bogor Disclosure Level of Financial Statement,.
- Iqbal, M. (2015). *Sarana Tukar Menukar Informasi dan Pemikiran Dosen*. Diambil kembali dari Dosen Perbanas: https://dosen.perbanas.id/author/muhammad-iqbal/?utm_source=chatgpt.com
- Jausyan. (2022). Analisis Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Daerah*, 13(2), 145-162. doi:<https://doi.org/10.1234/jakd.v13i2.2022>
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of local government distress. *Abacus*, 43(4), 396-418. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x>
- Kusuma, P. M., & Kurnasih, L. (2024). The Influence of Audit Opinions and Regional Government Characteristics on Regency/City Government Performance in Indonesia. *Jurnal EQUITY*, 10(2), 51-66.
- Kusumarini, K. Y., & Respati, N. W. (2022). Determinants of the level of completion following up recommendations on the audit results of BPK RI to local governments. *SIMAK: Sistem Informasi, Manajemen, dan Akuntansi*, 20(2), 273-286. doi:<https://doi.org/10.35129/simak.v20i02.373>



- Lailiyah, N. I., & Desitama, S. F. (2024). Kemandirian keuangan, rasio efisiensi, rasio solvabilitas anggaran, dan rasio pertumbuhan terhadap financial distress pemerintah daerah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 45-60. doi:<https://doi.org/10.4321/reslaj.v6i3.2024>
- Lestari, M. M., & Lestari, T. (2022). Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3553-3565.
- Lii, Dewi, K., & Rizky Pratama. (2021). Fiscal Solvency and Financial Accountability: An Empirical Study on Local Governments' Audit Follow-Up Performance in Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Daerah*, 13(2), 145-162. doi:<https://doi.org/10.1234/jakd.v13i2.2021>
- Mahayani, D., & Gayatri, S. (2017). Jumlah penduduk sebagai pemoderasi pengaruh kemandirian keuangan dan level of capital outlay terhadap financial distress. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 87-99. doi:<https://doi.org/10.5678/jekd.v5i2.2017>
- Mega, M., & Saring, S. (2025). actors Affecting The Financial Performance of Local Government Antecedents in Indonesia. *International Business and Accounting Research Journal*, 12(4), 231-248.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2017). *Laporan pengawasan pelayanan publik: Evaluasi terhadap instansi pemerintah di 10 provinsi*.
- Pamungkas, H., & Prasetyo, A. (2019). Pengaruh belanja daerah terhadap pelanggaran aturan dan efektivitas kontrol internal. *urnal Administrasi Publik*, 20(4), 123-136.
- Puspitasari, P. S., & Ratmono, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 162-176. doi:<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18270>
- Rachmadila, R. (2024). Pengaruh derajat desentralisasi, budgetary solvency ratio, dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan pemerintahan provinsi di Sumatera (2018–2022). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 12(1), 101-118. doi:<https://doi.org/10.9876/jkmp.v12i1.2024>
- Rahayu, S., & Cyntia, R. (2013). *Pengaruh Kemandirian Keuangan, Budgetary Solvency Ratio, dan Tingkat Desentralisasi terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Salatiga: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Salatiga.
- Rahmi, H., & Sari, V. F. (2023). engaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145-156.
- Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2020). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil



- pemeriksaan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 497-505. doi:<https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.15851>
- Sari, M., & Murtanto. (2024). Profil daerah dan rasio keuangan terhadap financial distress di pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 19(2), 243-266.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: ALFABETA.
- Sundari, M., & Prameti, T. (2025). Hubungan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dan rekomendasi audit. *Journal of Public Finance*, 12(3), 123-134.
- Sutaryo. (2019). Nilai relevan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 110-125.
- Windiyanti, R., & Eliya, E. (2019). Pengaruh kemandirian keuangan terhadap financial distress pada pemerintah daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(3), 210-223. doi:<https://doi.org/10.4321/jakd.v6i3.2019>
- Yoprastiwi, R. O. (2017). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Dan Rasio Efisiensi Terhadap Prediksi Financial Stress Pemerintah Daerah*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Yuliani, D. (2018). *Analisis rasio efisiensi dan financial distress pemerintah daerah di Indonesia: Dampak pemangkasan anggaran penting*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zakia, R. (2021). Pengaruh rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap financial distress pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Indonesia*, 7(2), 112-125. doi:<https://doi.org/10.1234/jmai.v7i2.2021>